

Pengaruh PNPB Berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang Pada PNPB KPKNL Bandung

Yuli Nugeti Amelia¹, Yendah Februarty Sinaga², Euis Hernawati³,

¹Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: piksi.yuli.18301154@gmail.com

²Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: piksi.yendah.18301158@gmail.com

³Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, email: euishernawati68@gmail.com

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan
dan Investasi)

Vol. 5, No.2 , Januari 2022
Halaman : 117 - 128

© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

Biaya Administrasi Pengurusan
Piutang Negara; Bea Lelang;
Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

JEL. classification :

C33, G21, G24, N15, N25

Contact Author :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangerang Selatan –
Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email :
sekuritas@unpam.ac.id

Abstrak. Mengetahui pengaruh biaya administrasi pengurusan piutang negara serta bea lelang terhadap pendapatan negara bukan pajak di KPKNL Bandung merupakan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data olahan dari laporan realisasi pendapatan negara bukan pajak dan capaian kinerja KPKNL Bandung periode 2016-2020 yang menggunakan IBM SPSS statistics 26. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu uji analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, asumsi klasik, dan untuk menguji hipotesis digunakan Uji t dan Uji f dengan tingkat signifikansi 5%, dilihat dari Hasil penelitian uji-t Biaya administrasi pengurusan Piutang Negara tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun untuk bea lelang terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan, dan pengujian dengan uji-F menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Negara bukan pajak di KPKNL Bandung dengan hasil uji koefisien menunjukkan pengaruh sebesar 99,3%.

Abstract. Knowing the effect of administrative costs of state receivables management and auction fees towards non-tax state revenues at KPKNL Bandung is the purpose of this study, the research method used is quantitative methods with descriptive analysis using processed data from reports on realization of non-tax state revenues and performance achievements at KPKNL Bandung period 2016-2020 using IBM SPSS statistics 26. The technique used in analyzing the data is multiple linear regression analysis test, coefficient of determination, classical assumptions, and to test the hypothesis used t test and f test with a significance level of 5%, seen from the results of the research t-test administrative costs of state receivables management do not have a significant effect on Non-Tax State, but forit is auction fee to have a significant positive effect, and testing with the F-test test shows that all independent variables have a significant effect on non-tax state revenue at KPKNL Bandung with coefficient test results showing an effect of 99.3%.



A. PENDAHULUAN

APBN atau yang biasa dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu dari upaya Pemerintah sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan, kegiatan-kegiatan pemerintahan, dan secara umum sebagai penentu arah prioritas pembangunan untuk meningkatkan pendapatan nasional, mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas ekonomi nasional.

Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan APBN lebih dititik beratkan pada pelaksanaan belanja, untuk membiayai sektor kesehatan, bantuan sosial, dan belanja-belanja negara lainnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan dampak bawanya. sebagai upaya menjaga defisit APBN agar tidak semakin membengkak karena pengeluaran negara lebih besar dari pada pendapatan, PNBPN yang merupakan unsur pokok dari salah satu pendapatan negara setelah pajak sama halnya dalam beberapa tahun belakang, pada masa pandemi ini pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak semakin dioptimalkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian.

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 9 (Republik Indonesia 2018) pengertian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diartikan yaitu suatu penerimaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pemerintah pusat terima selain dari penerimaan yang berasal dari hibah dan pajak yang dikelola dengan mekanisme APBN atas kegiatan badan usaha atau orang pribadi pemanfaatan suatu sumber daya, pelayanan, dan hak didapat dari negara yang diperoleh yang mendapatkan manfaat secara tidak langsung ataupun langsung. Salah satu kementerian yang memiliki kewenangan memungut PNBPN yaitu Kementerian keuangan sebagaimana dalam (Peraturan pemerintah RI 2018) Nomor: 3 tentang Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Keuangan merupakan PNBPN yang bersumber dari Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki beberapa unit vertikal diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung atau sering disebut KPKNL Bandung yang terletak di Jl Asia Afrika Bandung yang dibawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Barat. KPKNL Bandung mempunyai kewenangan dalam pemungutan PNBPN yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang kekayaan negara, piutang negara, penyelenggaraan lelang dan penilaian, dengan meliputi beberapa wilayah tugas yaitu: Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Pelaksanaan kegiatan fungsi dan tugas di KPKNL Bandung memberikan kewenangan kepada KPKNL Bandung untuk memungut beberapa PNBPN diantaranya yaitu PNBPN berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD), bea Lelang (bea lelang pejabat kelas I yaitu lelang yang dilaksanakan langsung oleh pegawai KPKNL), bea lelang pegadaian, serta pendapatan-pendapatan lainnya yang mana beberapa pendapatan tersebut diakui sebagai PNBPN dalam laporan realisasi pendapatan negara bukan pajak KPKNL Bandung.

Di ambil dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui Pengaruh dari PNBPN berupa BIAD (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) serta Bea Lelang terhadap penerimaan negara bukan pajak di KPKNL Bandung selama periode tahun 2016-2020.



B. KAJIAN LITERATUR

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam jurnal Hastuti (2018) pengertian penerimaan negara bukan pajak atau yang disingkat menjadi PNBPN dapat diartikan sebagai pendapatan yang didapatkan dari kegiatan selain dari sektor pajak yang pelaksanaannya menggunakan dana atau anggaran, fasilitas, dan juga sarana dan prasana baik berupa uang, barang maupun bentuk lainnya yang berasal dari pemerintah sehingga akan diakui sebagai penerimaan negara, yang mana penerimaan tersebut sesegera mungkin harus disetorkan pada kas negara dengan mengikuti segala tahapan-tahapan yang berlaku agar dapat dicatat sebagai penerimaan negara.

Menurut (Anindita 2019) PNBPN adalah penerimaan yang muncul karena adanya kegiatan dari pelaksanaan atas fungsi dan tugas pemerintah dalam perlindungan masyarakat, pelayanan, pengelolaan atas kekayaan negara, serta pemanfaatan SDA yang menjadi salah satu unsur dari penerimaan negara selain dari sektor pajak yang berperan penting dalam tercapainya target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan harapan pemerintah.

Biaya Administrasi

Dalam buku (Frida 2020) pengertian biaya administrasi merupakan biaya yang biasa di pungut terkait adanya pelaksanaan dari kegiatan administrasi dengan jumlah yang dikenakan tergantung dengan kebijakan pelaksana administrasi. Biaya sendiri memiliki arti sebagai pengeluaran atau suatu pengorbanan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang telah terjadi maupun akan terjadi, dan administrasi merupakan kegiatan penatausahaan yang mencakup kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pengarsipan surat, pembukuan serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyediakan informasi agar saat dibutuhkan informasi tersebut mudah untuk diperoleh.

Piutang Negara

Menurut (Kassmoni and rachmatullaily 2016) Piutang adalah suatu tuntutan seseorang atau suatu perusahaan pada pihak lain terkait dengan adanya hutang atas transaksi dari pendapatan atau penjualan ataupun merupakan hutang yang berasal dari transaksi lain yang harus dibayarkan sesegera mungkin kepada pemberi hutang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Piutang Negara merupakan besarnya hutang yang harus dibayarkan oleh seseorang atau suatu Lembaga yang umumnya terhutang kepada suatu instansi yang modal atau kekayaannya sebagian besar ataupun sepenuhnya milik Negara yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat.

Piutang negara dalam penagihannya terutama di KPKNL sistemnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2016, dengan sistem sebagaimana berikut:

- 1) Penyerahan Pengurusan Piutang Negara,
- 2) Penerimaan Pengurusan Piutang Negara,
- 3) Pemanggilan Pertama sampai Pemanggilan Terakhir,
- 4) Pernyataan Bersama,
- 5) Penetapan Jumlah Piutang Negara,
- 6) Surat Paksa,
- 7) Penyitaan,
- 8) Lelang,
- 9) Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih,
- 10) Pembayaran Hutang,
- 11) Piutang Negara Selesai,



Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Menurut (Maughfirotul Iayliyah 2010) Biaya Administrasi Piutang Negara atau BIAD adalah salah satu Penerimaan Negara dari PNBPN yang diserahkan kedalam Kas Negara atas setiap pengurusan piutang negara yang akan dibebankan pada Penjamin Hutang atau Penanggung Hutang yang terhitung dikenakan mulai tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan Penjamin Hutang atau Penanggung Hutang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan atau melunasi hutangnya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lelang

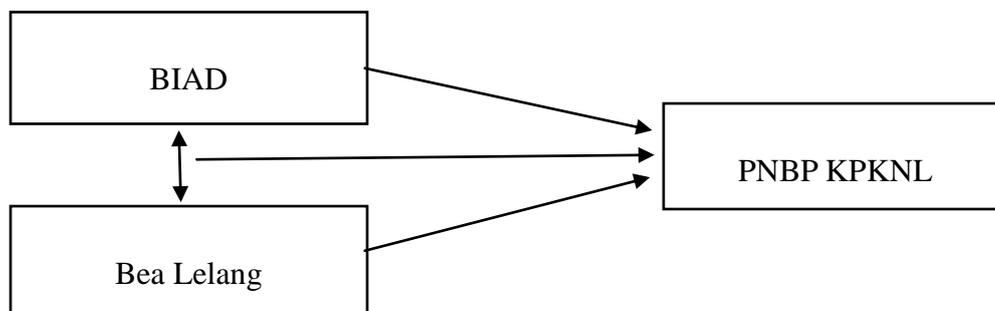
Sebagaimana dalam jurnal (Tista 2016) Lelang merupakan salah satu cara penjualan barang dimuka umum yang memiliki tujuan barang terjual tanpa memperhatikan kondisi barang namun barang tersebut dapat terjual secepat mungkin dengan harga yang kompetitif dan sistem lelang dilakukan dihadapan pejabat lelang yang mana pelaksanaannya dapat dimulai dengan adanya pengumuman lelang dan penawaran dapat dilakukan secara lisan atau tertulis maupun terbuka atau tertutup.

Dengan adanya pelaksanaan lelang, kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif pada kestabilan keuangan dan ekonomi yaitu berdampak pada peningkatan perputaran uang, meningkatkan volume transaksi dari suatu jual-beli, dan juga membantu dalam peningkatan likuiditas suatu organisasi terutama dalam lembaga keuangan yaitu seperti perbankan, selain itu juga pelaksanaan lelang memberikan dampak juga pada peningkatan pendapatan negara karena pada setiap pelaksanaan lelang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib dikenakan PPH Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Lelang yang mana pengenaan tersebut akan disetorkan ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara dari perpajakan ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bea Lelang

Bea lelang merupakan bea yang menurut aturan perundang-undangan, dikenakan atas kegiatan pelaksanaan lelang yang dikenakan pada penjual yang merupakan seseorang, badan usaha, instansi, maupun badan hukum dimana sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan dalam menjual barangnya secara lelang dan pada pembeli yang merupakan orang atau badan usaha atau badan hukum yang disahkan sebagai pemenang lelang yang mengajukan penawaran dengan harga tertinggi, dimana akan masuk pada kas negara serta diakui sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

- 1) BIAD (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di KPKNL Bandung periode tahun 2016 – 2020.
- 2) Bea Lelang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di KPKNL Bandung periode tahun 2016 – 2020.
- 3) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) bersamaan dengan Bea Lelang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di KPKNL Bandung periode tahun 2016 – 2020.

C. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dengan analisis deskriptif merupakan suatu metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini dengan menampilkan tabel dengan meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum dan standar deviasi bertujuan untuk menampilkan gambaran pada variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini. Metode kuantitatif sendiri dalam buku (sugiyono 2016:35) dapat diartikan bahwa metode kuantitatif merupakan suatu metode yang memakai instrument penelitian dengan mempunyai sifat kuantitatif dalam menganalisis, yang mana tujuannya agar hipotesis yang telah ditetapkan dapat diuji dengan penggunaan analisis bersifat statistik atau kuantitatif, metode ini juga berlandaskan sifat positivisme yang mana dalam penelitiannya menggunakan sampel atau populasi tertentu, dan menggunakan instrument penelitian dalam mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara dan dokumentasi secara langsung, yang mana peneliti melakukan praktek kerja lapangan selama tiga bulan di KPKNL Bandung agar peneliti bisa secara langsung mengamati dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk penelitian ini data yang dipergunakan yaitu olahan yang didapat dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi PNB dan capaian kinerja di KPKNL Bandung untuk periode tahun 2016 – 2020 yang dapat menggambarkan variabel yang ada dalam penelitian ini seperti total BIAD, Bea Lelang, serta total PNB di KPKNL Bandung, selain itu untuk semakin melengkapi penelitian ini peneliti juga menggunakan beberapa data sekunder dengan melakukan studi pustaka serta *browsing*.

Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan alat bantu dalam menganalisa data yang mana peneliti menggunakan program SPSS V26 sebagai alat bantu peneliti dalam menganalisa yang dapat menampilkan hasil statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji parsial atau Uji T, uji simultan, serta uji koefisien determinasi.

Operasional Variabel

Penulis didalam penelitian ini memilih untuk menggunakan tiga variabel yang dikelompokkan menjadi variabel bebas yang terbagi menjadi dua dan satu variabel terikat berikut uraiannya:

- 1) Variabel Independen (Variabel Bebas), dalam buku (sugiarto 2017:78)“Variabel bebas atau variabel Independen adalah variabel dengan memiliki pengaruh maupun memberikan sebab terhadap variabel terikat”. Yang menjadi variabel independen (variabel bebas) didalam penelitian ini yaitu Biaya administrasi Pengurusan piutang Negara (BIAD) disimbolkan dengan Variabel x_1 , dan Bea Lelang Pejabat Kelas I dengan simbol Variabel x_2 .
- 2) Variabel Dependen (Variabel Terikat), dalam buku (sugiarto 2017:78)“ Variabel terikat atau dependen diartikan sebagai suatu variabel yang nilainya dapat dipengaruhi karena



terdapat pengaruh dari suatu variabel bebas”. Di mana dalam penelitian ini Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP KPKNL) disimbolkan dengan Variabel Y digunakan sebagai variabel dependen (variabel terikat).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil output statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BIAD	5	111407517	1200504203	409331860,80	460003109,043
Bea Lelang	5	7899500168	32341478714	19570049975,00	11212992409,006
PNBP KPKNL	5	11073439717	32513487990	22486389696,60	10346659463,197
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Tabel 1. Yaitu hasil yang menampilkan output statistik deskriptif menunjukkan untuk variabel dependen yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KPKNL) Bandung selama 2016-2020, memiliki nilai minimumnya senilai 11073439717 atau senilai 11.073.439.717, dengan nilai maksimum 32513487990 atau senilai 32.513.487.990, dan untuk nilai rata-rata ada dinominal 22486389696,60 atau 22.486.389.696,60, sedangkan untuk standar deviasinya yaitu 10346659463,197 atau sebesar 10.346.659.463,197.

Variabel independent untuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) untuk periode 2016-2020, nilai minimumnya yaitu 111407517 atau sebesar 111.407.517, dengan nilai maksimum 1.200.504.203, nilai rata-rata yaitu 409331860,80 atau sebesar 409.331.860,80, sedangkan standar deviasinya yaitu 460003109,043 atau memiliki nilai sebesar 460.003.109,043.

Dan untuk variabel independent yang ke dua yaitu Bea Lelang pada tahun 2016 -2020, memiliki nilai minimum sebesar 7899500168 yaitu sebesar 7.899.500.168, nilai maksimum dengan nilai 32341478714 atau sebesar 32.341.478.714, dengan nilai rata-rata 19570049975,00 atau sebesar 19.570.049.975,00, dan standar deviasi yang memiliki nilai 11212992409,006 atau sebesar 11.212.992.409,006.



Hasil pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000011
	Std. Deviation	884601814,5 5730890
Most Extreme Differences	Absolute	,248
	Positive	,216
	Negative	-,248
Test Statistic		,248
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Di mana dari tabel uji normalitas diatas yaitu Tabel. 2 dapat diketahui bahwa hasil statistik uji normalitas dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov, menyatakan bahwa jika data tersebut terdapat nilai yang lebih tinggi dari nilai 0,05 yang berarti dari tabel tersebut dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal karena memiliki nilai asymp. Sig 0,200.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil output Uji Multikolinieritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	BIAD	,919	1,088
	Bea Lelang	,919	1,088
a. Dependent Variable: PNBPKPKNL			

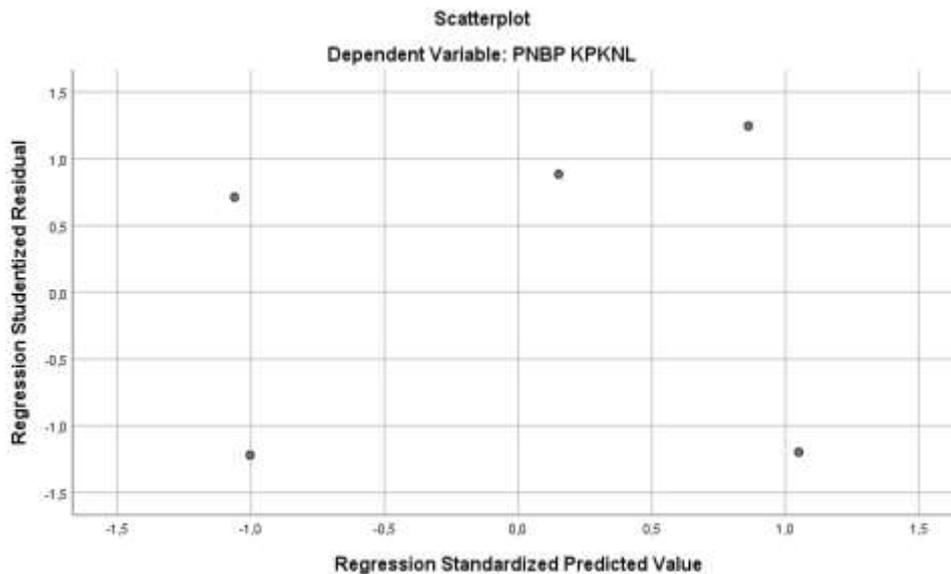
Sumber: data KPKNL, diolah V.26

Jika berdasarkan tabel 3. Yang ada diatas nilai tolerance yang diketahui untuk variabel X1 dan X2 yaitu Biaya administrasi pengurusan piutang negara serta bea lelang mempunyai tolerance dengan nilai 0,919 yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari 0,10, dan untuk nilai VIF yang dimiliki oleh kedua variabel tersebut nilainya lebih rendah jika dibandingkan



dengan 10,00 karena dalam penelitian ini nilai VIF yaitu 1,088, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi dengan pengujian yang mengacu pada dasar keputusan uji multikolinieritas maka tidak ada gejala multikolinieritas antara setiap variabel independent dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Gambar 1. Hasil Uji scatterplot

Untuk hasil uji heteroskedastisitas yaitu dengan berdasarkan gambar scatterplot diatas menunjukkan titik data tidak berpola atau titik data menyebar, titik yang ditunjukkan dalam gambar tersebut terlihat menyebar dibawah dan diatas disekitar angka 0 (nol), sehingga dalam model regresi ini bisa diketahui bahwa tidak ada terjadinya suatu heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Output Uji Coefficients

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4171894325,192	1253354914,566		3,329	,080
	BIAD	2,234	1,418	,099	1,575	,256
	Bea Lelang	,889	,058	,964	15,282	,004

a. Dependent Variable: PNBPKPKNL

Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Diperoleh dari tabel 4. diperoleh persamaan regresi dengan linier berganda dengan menjadi seperti berikut:

$$Y = 4171894325,192 + 2,234x_1 + 0,889x_2$$



Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dinyatakan, apabila koefisien regresi pada variabel BIAD sebesar 2,234 maka artinya yaitu setiap pertambahan 1% pendapatan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara atau (X_1), maka Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang disimbolkan dengan (Y) akan mengikuti peningkatan sebesar 2,234%.

Dan apabila koefisien regresi pada variabel Bea Lelang yaitu sebesar 0,889, memiliki arti yaitu setiap pertambahan 1% pendapatan dari Bea Lelang atau (X_2) maka Penerimaan Negara Bukan Pajak atau (Y) akan mengikuti peningkatan sebesar 0,889%.

Uji Parsial T

Berdasarkan tabel 4. uji coefficients, diketahui dan dapat disimpulkan hasil yang didapat sebagai berikut:

- 1) diketahui untuk variabel BIAD mempunyai nilai dengan signifikan yaitu senilai $0,256 > 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} diperoleh $1,575 < 4303$ ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka dapat disimpulkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara positif maupun negatif terhadap PNBPKPKNL Bandung,
- 2) variabel Bea Lelang mempunyai nilai signifikan yaitu dengan nilai $0,004 < 0,05$ dan juga untuk nilai t_{hitung} $15,282 > 4,303$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), sehingga dapat disimpulkan Bea lelang jika secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PNBPKPKNL Bandung.

Uji Simultan (UJI F)

Tabel 5. Hasil output Uji Simultan (UJI F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4250833667082 15150000,000	2	2125416833541 07580000,000	135,806	,007 ^b
	Residual	3130081481272 430600,000	2	1565040740636 215300,000		
	Total	4282134481894 87600000,000	4			
a. Dependent Variable: PNBPKPKNL						
b. Predictors: (Constant), Bea Lelang, BIAD						

Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Berdasarkan tabel 5. nilai tingkat signifikan yang diperoleh lebih rendah jika dibandingkan dengan 0,05 karena memiliki nilai 0,007, lalu untuk nilai F hitung tertera senilai 135,806 nilai ini yang digunakan untuk membandingkan dengan F tabel dengan signifikan 0,05 dengan menggunakan 1 variabel yang terikat, serta 2 variabel yang bebas, dengan total observasi 5 tahun, maka $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$, sehingga didapat F tabel dengan nilai 19,00 yang artinya F tabel lebih kecil F hitung, maka dapat dinyatakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) bersamaan dengan Bea Lelang secara simultan mempunyai pengaruh pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Bandung.



Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji output Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,996 ^a	,993	,985	1251015883,447
a. Predictors: (Constant), Bea Lelang, BIAD				
b. Dependent Variable: PNBPKPKNL				

Sumber: data KPKNL, diolah spss V.26

Dengan hasil uji koefisien diketahui jika R Square memiliki nilai yaitu 99,3% atau 0,993 yang dapat dinyatakan bahwa biaya administrasi piutang negara serta bea lelang mempengaruhi PNBPKPKNL 99,3%, dan memiliki sisa yaitu sebesar 0,7% adalah pengaruh atas variabel dari yang tidak termasuk dalam sebuah penelitian yang dilakukan kali ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara terhadap PNBPKPKNL Bandung.

Berdasarkan dengan hasil dari uji analisis dari yang dijelaskan diatas yaitu dengan uji parsial t, dimana variabel BIAD memiliki signifikan dengan nilai lebih tinggi dari 0,05 dimana nilainya yaitu sebesar 0,256 dengan mempunyai nilai T hitung sebesar 1,575 yang mana lebih besar dari T tabel 4,303 ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka dapat disimpulkan bahwa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara jika secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif maupun negatif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL Bandung selama periode tahun 2016-2020.

Pengaruh Bea Lelang terhadap PNBPKPKNL Bandung.

Berdasarkan dengan pengujian yang telah dilakukan peneliti, bea lelang nilai signifikannya memiliki nilai yang mana lebih rendah dibandingkan 0,05 yaitu 0,004 dengan memiliki nilai t hitung $15,282 > 4,303$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dari hal ini dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini dari 2 variabel bebas yang terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap PNBPKPKNL Bandung selama tahun 2016-2020 hanya bea lelang yang memiliki pengaruh, sehingga dapat dikatakan tidak setiap variabel yang ada dalam PNBPKPKNL ketika ada kenaikan selalu diikuti dengan kenaikan terhadap PNBPKPKNL pada suatu instansi, seperti hal nya dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian (Yusraidah and Fatahurrazak 2016) hasil penelitian dalam penelitian ini untuk periode 2011-2015 PNBPKPKNL pembawa hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap PNBPKPKNL Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang.

Pengaruh BIAD dan Bea Lelang terhadap PNBPKPKNL Bandung

Berdasarkan dengan Uji Simultan atau Uji F hasil analisis menunjukkan BIAD dan Bea Lelang terdapat pengaruh yang cukup signifikan pada PNBPKPKNL Bandung, hal ini dapat dibuktikan dimana nilai signifikan yang didapat yaitu 0,007 yang mana bila dibandingkan dengan nilai (α) yaitu 0,05 nilai tersebut lebih rendah, dan nilai F tabel memiliki nilai yang lebih tinggi dari F hitung dimana F tabel memiliki nilai 19,00 dan F hitung sebesar 135,806 yang artinya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) dan Bea Lelang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPKPKNL) KPKNL Bandung. Hal tersebut juga didukung dengan uji koefisien determinasi yang menunjukkan kedua variabel tersebut mempengaruhi PNBPKPKNL Bandung R Square



memiliki nilai sebesar 0,993 atau sebesar 99,3% dan sisanya 0,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dari penelitian yang dilakukan ini.

E. KESIMPULAN

Dari uraian hasil serta pembahasan tersebut yang berkenaan tentang pengaruh Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) serta Bea Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Bandung selama periode 2016-2020, maka jika disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika secara parsial Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PNBP KPKNL Bandung, maka untuk hipotesis pertama yang mana menyatakan jika BIAD mempunyai pengaruh signifikan terhadap PNBP di KPKNL Bandung periode 2016-2020 ditolak karena dari hasil tidak terbukti berpengaruh yang signifikan.
- 2) Bea Lelang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PNBP KPKNL Bandung, maka untuk hipotesis kedua ini menyatakan jika Bea Lelang berpengaruh signifikan terhadap PNBP di KPKNL Bandung periode 2016-2020 diterima karena terbukti secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan.
- 3) Dan untuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara bersamaan dengan Bea Lelang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PNBP KPKNL Bandung, maka hipotesis ketiga yang menyatakan BIAD dan Bea Lelang berpengaruh signifikan terhadap PNBP di KPKNL Bandung periode 2016-2020 diterima karena terbukti secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita. 2019. "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara." 2(1):19–35.
- Frida, Catharina Vista Okta. 2020. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Garudhawaca.
- Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and its implication on company value of real estate and property sector listing in IDX period of 2011-2015. *Man in India*, 97(24), pp. 131-148.
- Hastuti, Hastuti. 2018. "Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 1(2):55–63. doi: 10.35326/jiam.v1i2.249.
- Husain, T., & Sunardi, N. (2020). Firm's Value Prediction Based on Profitability Ratios and Dividend Policy. *Finance & Economics Review*, 2(2), 13-26
- Kassmoni, Virna Dewi, and Rachmatullaili. 2016. "Prosedur Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor." 4(1):18.
- Kadim, A., Sunardi, N & Husain, T. (2020). The modeling firm's value based on financial ratios, intellectual capital and dividend policy. *Accounting*, 6(5), 859-870.
- Maughfirotul Layliyah. 2010. "IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE DECREE OF STATE REGULATION IN OFFICE AND STATE AUTHORITY SERVICES (KPKNL) JEMBER." 68–74.
- Nardi Sunardi Et Al (2020). Determinants of Debt Policy and Company's Performance, *International Journal of Economics and Business Administration* Volume VIII Issue 4, 204-213



Peraturan pemerintah RI. 2018. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan."

Republik Indonesia, Undang-undang. 2018. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak."

sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. yogyakarta: Andi.

sugiyono. 2016. *Meode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Tista, Adwin. 2016. "PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA." 5(10):46–70.

Yusraidah, and Fatahurrazak. 2016. "Pengaruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Seksi Karantina Hewan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2011-2015." *Akuntansi* 1–18.

